

BAB IV

PERAN KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM NEGOSIASI WACANA

Bab ini merupakan analisa lebih lanjut dari pada yang telah ditemukan sebelumnya dalam analisis wacana berdasarkan pola yang dibentuk oleh Fairclough terhadap fenomena pemberitaan CNN Indonesia tentang “Penyiar Berita Perempuan Saudi Pertama”. Secara spesifik bab ini merupakan bentuk penjabaran lebih luas tentang analisa level makro dengan menghubungkan pada fenomena dan pemikiran – pemikiran lain yang telah ada sebelumnya.

Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana terdapat pertentangan antara wacana yang dibangun oleh produsen teks dengan wacana masyarakat yang tertuang melalui wacana konsumen teks. Telah dikemukakan juga dalam tahap analisa makro beberapa alasan yang dapat menjelaskan bagaimana pertentangan itu ada.

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, Arab Saudi menjadi acuan utama pengetahuan akan kepercayaan Islam. Hal ini tertuang salah satunya dari bagaimana penggunaan bahasa Arab dalam ritual-ritual keagamaan Islam (Nur, 2014: 242). Arab Saudi juga menjadi negara tujuan wisata religi bagi masyarakat muslim Indonesia.

Nilai-nilai Islam sendiri telah menjadi nilai yang banyak diadopsi kedalam sistem-sistem kehidupan masyarakat. Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, sistem pendidikan berbasis keIslaman seperti pesantren dan sekolah madrasah terus berkembang hingga saat ini. Dalam sektor ekonomi juga hadir bank-

bank dengan sistem syariah yang mengacu pada ketetapan berbasis keIslaman (Hamad, 2005). Bahasa Arab sendiri juga memberikan banyak sumbangan dalam penggunaan bahasa Indonesia (Nur, 2014: 242). Bahkan beberapa peraturan perundang-undangan juga menggunakan nilai-nilai agama Islam seperti misalnya undang-undang perkawinan (Amilia, 2012: 222). Beberapa hal tersebut mendasari bagaimana sumbangsih budaya Arab dan Islam yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya ini terus direproduksi sebagai upaya mempertahankan sistem kepercayaan.

Perkembangan pengetahuan kepercayaan Islam yang termanifestasi dalam tatanan sosial masyarakat menghasilkan perbedaan cara pandang dari kelompok-kelompok berbasis Islam yang secara garis besar diwakili oleh pandangan kelompok moderat dan konservatif.

Negosiasi tentang bentuk penggunaan hijab menjadi salah satu hal yang diperdebatkan. Mayoritas masyarakat Indonesia telah mengadopsi penggunaan hijab namun kemudian terdapat pandangan hijab yang 'ideal' bagi masyarakat Indonesia. Tingkat keimanan diukur dengan bagaimana cara penggunaan hijab. Mereka yang berhijab dengan cara yang 'benar' akan dianggap lebih beriman, sedangkan yang penggunaannya kurang ideal atau tidak berhijab, oleh pandangan konservatif dinilai kurang beriman dan telah mendapat pengaruh dari budaya barat. Pandangan konserfatif bahkan menuntut perempuan untuk menggunakan penutup cadar. Namun, cara berpakaian inipun mendapatkan penolakan karena adanya stereotype sebagai teroris.

Kedua pandangan ini juga melihat bagaimana seharusnya peran perempuan dalam ranah publik. Pandangan moderat menempatkan kesetaraan gender sebagai hal yang perlu untuk dilakukan, sedangkan pandangan konservatif menempatkan pekerjaan perempuan mutlak pada ranah domestik. Masyarakat Indonesia telah mengakomodir pemikiran moderat, namun negosiasi kesetaraan gender ini masih terus diperdebatkan.

4. 1. Respon sebagai hasil Proses Pemaknaan

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemaknaan yang dilakukan oleh para konsumn berita CNN tentang penyiar berita perempuan Saudi pertama. Dari analisa sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa konsumen menolak/tidak setuju dengan isi pemberitaan yang dilakukan CNN sebagai produsen teks. Pada dasarnya konsumen merupakan subyek yang aktif dalam membentuk makna berdasarkan kemampuan mereka masing-masing diluar dari makna yang sebenarnya ingin ditawarkan oleh produsen. Para konsumen melakukan apa yang disebut Charles Osgood sebagai *Semantic Meaning Theory*. Respon yang keluar adalah hasil proses pemaknaan yang ada dalam diri setiap individu terhadap rangsangan yang telah diterima sebelumnya. Makna tidak dipelajari sebagai sebuah hasil pengalaman langsung dengan rangsangan tersebut secara asli/nyata, namun dipelajari melalui sebuah asosiasi antara satu tanda dengan tanda lainnya (Littlejohn, 2009: 189-192). Pengetahuan akan tanda-tanda membentuk pengalaman individu hingga pada akhirnya pengetahuan dan pengalaman ini menjadi kunci pemaknaan yang dilakukan terhadap rangsangan yang diterima.

4. 2. Pengetahuan dan Kuasa (Foucault)

Berangkat dari pemahaman tentang bagaimana respon merupakan hasil dari pengetahuan, Foucault mengemukakan bagaimana hubungan kekuasaan dengan pengetahuan. Pengetahuan membentuk kuasa, disisi lain kuasa melanggengkan pengetahuan. Kekuasaan dalam gambaran Foucault sebenarnya bukan kekuasaan yang sifatnya negatif. Hanya saja, kekuasaan memiliki kemampuan untuk membentuk *diciplinary power*. *Diciplinary power* merupakan sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan beroperasi membentuk rantai atau sistem serta berupaya mengisolasi mereka dari kekuasaan yang lainnya. Pendisiplinan merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu. Kekuasaan lebih dilihat sebagai sebuah strategi, sedangkan relasi kekuasaan merupakan hasil dari strategi tersebut (Mudhoffir, 2013: 77-80).

Agama merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang memiliki kuasa. Pengetahuan dan kuasa ini menimbulkan bentuk tatanan masyarakat yang mengacu pada aturan tertentu, hingga memunculkan organisasi-organisasi berbabsis pengetahuan tersebut. Selain merupakan bentuk pengetahuan, agama juga merupakan bentuk kuasa yang dengan sengaja/tidak disengaja memproduksi pengetahuan tersebut secara teratur dan sistematis dalam bentuk pendisiplinan.

Penelitian dilakukan Joko Priyanto (2017) yang membahas bagaimana wacana kuasa dan agama dalam kontestasi pilgub Jakarta. Secara spesifik tulisan tersebut membahas pemerintahan kasus penistaan agama oleh basuki

tjahaja purnama (Ahok). Pemikiran Foucault tentang pengetahuan dan kuasa dipakai dalam upaya menerangkan fenomena pertarungan abad modern yang melihat adanya perbedaan pendapat antara kubu Ahok dengan kelompok-kelompok Islam tertentu dalam memaknai wacana kebhinekaan.

Dalam kasus ini, perlawanan dalam bentuk aksi-aksi banyak datang dari masyarakat (kelompok-kelompok) Islam. Dalam satu sisi, kelompok ini dilihat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Gubernur Ahok, tetapi di sisi lain kelompok ini juga dinilai hanya melakukan upaya resistensi dari adanya bentuk-bentuk pelaksanaan pemerintahan baru. Pandangan ini melihat bahwa perlawanan yang dilakukan hanya sebagai upaya menuntut adanya perubahan arah kebijakan dengan (kembali) mengacu pada pengetahuan akan keIslaman. Pengetahuan dalam bentuk keyakinan Islam dilihat sebagai pengetahuan yang sudah mendarah daging sehingga hasil produksi pengetahuan ini adalah kekuasaan represif yang mampu untuk menggerakkan massa.

Lebih jauh penelitian ini juga melihat bagaimana hegemoni dilakukan sebagai upaya mempertahankan kekuasaan pengetahuan. Hegemoni yang dilakukan adalah dengan produksi wacana atau disebut sebagai diskursus pengetahuan. Pengetahuan yang dirancang dan dinegosiasikan dalam kasus Ahok adalah pengetahuan tentang Kebhinekaan. Pengetahuan ini disebarkan melalui berbagai media dan institusi sebagai sebuah proses pendisiplinan tubuh sosial. Pada akhirnya negosiasi hadir dalam dua pandangan. Kubu Ahok melihat aksi-aksi penolakan tersebut sebagai bentuk radikalisme dan rasisme yang memecahbelah nilai kebhinekaan. Disisi lain, para aktor aksi

melihat kebhinekaan sebagai bentuk toleransi keberagaman, dan menilai apa yang telah dilakukan Ahok adalah penistaan dan merusak kebhinekaan. Oleh sebab itu, aksi yang mereka lakukan dimaknai sebagai bentuk pembelaan terhadap kebhinekaan.

Penelitian tersebut menjadi gambaran serupa dengan kasus pemaknaan yang ada dalam kasus CNN Indonesia. Pemaknaan teks dan pemaknaan konsumen yang berbeda disinyalir merupakan negosiasi antar wacana. Jika dalam kasus Ahok wacana yang dinegosiasikan adalah wacana kebhinekaan, maka dalam kasus CNN wacana/ diskursus pengetahuan yang dinegosiasikan adalah soal kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dimaknai oleh produsen teks melalui pemenuhan akan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat tampil pada ranah publik, sedangkan masyarakat (para konsumen) melihat bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilakukan dengan cara demikian. Hal ini nampak jelas dari pernyataan yang dilakukan oleh akun Planner Pontianak "*Yang kayak gitu oleh media sekuler di bilang mencetak sejarah*". Kata pencetak sejarah dalam pembahasan analisa teks ditujukan kepada Weam Al Dakheel yang merujuk pada prestasi yang dilakukannya. Penolakan ini sebagai salah satu contoh bagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya tentang pandangan kelompok-kelompok agama tentang kepemimpinan/ tampilnya perempuan pada ranah publik. Wawan Gunawan (2012 : 232) menilai bahwa ada kelompok Islam yang tidak mengakui adanya persamaan laki-laki dan perempuan dalam praktik kepemimpinan, sehingga

keadilan dan kesetaraan gender adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Perempuan dinilai memiliki kekurangan secara alami dalam dirinya sehingga tidak dapat disamakan dengan laki-laki. Pandangan kelompok ini didasarkan pada asumsi Islam yang melihat wilayah publik dan wilayah domestik. Perempuan dengan kekurangannya dianggap tidak bisa berada pada wilayah publik. Pada akhirnya kesetaraan gender adalah sebuah diskursus yang kemudian dinegosiasikan bagaimana bentuknya. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai pandangan tentang bagaimana bentuk kesetaraan yang 'ideal' tersebut.

4. 3. Keberpihakan dan Negosiasi Wacana Kesetaraan Gender yang 'Ideal' (Standpoint)

Negosiasi wacana dapat terjadi ketika ada dua kelompok atau lebih yang memiliki perbedaan dalam pemaknaan wacana tersebut. Pada dasarnya masing-masing kelompok memiliki perspektif masing-masing sebagai alasan berpijak. Nancy C.M. mengemukakan tentang *Standpoint Theory* yang memahami sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar pengetahuan akan kehidupan sehari-hari. Individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri, dan bahwa mereka merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Kewenangan suara pribadi individu menegaskan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka bergabung (West & Turner, 2007: 499-509). Hallstein (2003: 3) juga

mengemukakan bahwa *Standpoint Theory* menyoroti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ditegaskan juga bahwa pengetahuan selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan politik. Sebagai konsekuensinya, dasar dari prinsip *Standpoint Theory* adalah bahwa pengetahuan selalu muncul pada lokasi sosial dan dibentuk oleh hubungan kekuasaan.

Dalam penelitian CNN ini negosiasi terjadi tentang wacana kesetaraan gender terhadap perempuan tertuang dalam 2 persoalan. Pertama adalah bagaimana perempuan dapat tampil dalam ranah publik yang diwakili dengan kehadiran Weam Al Dakheel sebagai penyiar berita. Persoalan kedua adalah soal bagaimana perempuan seharusnya berpenampilan yang secara spesifik mengarah pada penggunaan hijab yang dilakukan Weam Al Dakheel.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ada perbedaan pandangan antar kelompok-kelompok berbasis Islam dalam cara pandang terhadap peran perempuan. Pertama berkenaan dengan persoalan keberadaan perempuan dalam ranah publik. Pada satu sisi, beberapa masyarakat melihat bahwa perempuan tidak seharusnya berada pada ranah publik, memimpin, membuat kebijakan, dan sebagainya. Namun, disisi lain hal tersebut juga ditentang oleh kelompok masyarakat lainnya.

Abu Bakar Ba'asyir adalah salah satu contoh tokoh yang melolak kehadiran perempuan pada ranah publik. Ia menentang keras pencalonan Megawati sebagai presiden di tahun 2004. Dari kubunya Abu Bakar Ba'asyir mengeluarkan fatwa bahwa pemimpin perempuan itu haram. Perempuan dinilai dapat berkarir dan menduduki posisi-posisi di dalam karir yang

digelutinya namun tidak boleh menempati posisi sebagai pemimpin. (Adidhatama, 2009: 99) Pendapat ini kemudian dilihat bahwa perempuan tidak bisa berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.

Sebaliknya M. Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang mencoba menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. Hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya setara dan sederajat dengan hak yang dimiliki oleh para kaum laki-laki. Dalam hal ini dilihat bahwa Al-Quran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Quraish Shihab justru melihat pentingnya mengangkat harkat dan martabat kaum wanita karena itu adalah amanah dalam Al-Quran dan Hadis (Wartini, 2013: 488).

Kedua berkenaan dengan persoalan kewajiban cara berpakaian seorang perempuan dalam Islam. Sebagai contoh, sebuah tulisan pada republika.com menilai bagaimana seharusnya penampilan seorang muslimah. Dikatakan bahwa pakaian yang dikenakan perempuan Muslim mestinya sesuai dengan tata kesopanan Islam. Hal ini secara spesifik dijelaskan harus menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, pakaian itupun harus tidak tipis serta tidak membentuk lekukan tubuh (Republika.com). Abu Bakar Ba'asyir juga menekankan bagaimana perempuan muslim seharusnya berjilbab dan mengemukakan perlunya membuat perda tentang hal ini (Adidhatama, 2009: 98).

Disisi lain, hal semacam ini mendapatkan kritikan dari berbagai aktivis gender. Husein Muhammad menjadi salah satu pendukung hal ini. Ia mengeluarkan berbagai tulisan-tulisan tentang kesetaraan gender dalam pengetahuan bernada Islam. Salah satu hal yang dikaji adalah tentang konsep jilbab bagi perempuan muslim. Jilbab dinilai sebagai tradisi Arab yang berfungsi sebagai pembeda status sosial antara perempuan merdeka dan budak. Pada masa kini, sistem perbudakan telah dihapuskan sehingga kewajiban berjilbab juga mulai terhapuskan seiring berjalannya penghapusan sistem perbudakan tersebut. Ia juga menilai bahwa nas-nas kitab suci Islam dalam konteks jilbab adalah ‘temporal’ yang mana nas ini dikatakan dipengaruhi dengan adanya situasi, kondisi, dan zaman. Nas tersebut hadir dalam sistem perbudakan, namun perbudakan kini sudah dihapuskan sehingga hukum kewajiban menggunakan jilbabpun gugur (Duwal, Qoidud, 2009: 122-123).

Pada akhirnya negosiasi tentang kesetaraan gender banyak dipengaruhi oleh perbedaan tafsir dan pemahaman akan kitab suci. Kelompok-kelompok Islam dengan acuan tafsir atau pandangan pemahaman tertentu kemudian hadir dalam masyarakat untuk mempertahankan pengetahuan masing-masing. Kelompok-kelompok ini memiliki pandangan masing-masing dalam melihat fenomena-fenomena sosial. Dalam beberapa kasus, perbedaan pemahaman ini berujung pada aksi-aksi kekerasan hingga sering disebut sebagai radikalisme.

4. 4. Radikalisme Paham anti-mainstream - Kelompok Islam Radikal

Pada dasarnya istilah Radikal sendiri adalah sebuah bentuk labeling yang diproduksi dari konstruksi sosial bergantung pada siapa yang melakukan identifikasi terhadapnya. Istilah ini merupakan labelisasi tentang paham yang melatarbelakangi gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki ciri pembeda dari gerakan yang menjadi *mainstream*.

Istilah Islam radikal semakin sering muncul belakangan ini dengan merujuk pada fenomena-fenomena demonstrasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Sebelumnya istilah ini banyak keluar ketika ada ancaman terorisme. Sejarah mencatat bagaimana istilah Islam radikal awalnya banyak digunakan oleh masyarakat negara barat (Amerika) untuk melabeli mereka yang dicurigai sebagai teroris. Islam radikal merupakan wacana yang dikembangkan oleh negara barat dan merupakan fantasi mereka terhadap dunia Islam yang menakutkan. Perang Amerika terhadap teroris yang selalu dikaitkan dengan kelompok Islam garis keras berujung pada bentuk –bentuk diskriminasi tertentu hingga pada akhirnya wacana radikalisme ini kemudian menjadi wacana mendunia.

Karena pada dasarnya istilah ini adalah labeling yang diberikan oleh masyarakat dunia barat, maka disisi lain gerakan macam ini dapat dilihat juga sebagai bentuk melaksanakan perintah agama yang sering dikenal dengan istilah jihad. Mereka yang berada pada posisi pelaku aksi akan menilai sikap mereka sebagai bentuk membela Islam, sedangkan yang berlaku jahat atau

tidak benar adalah barat yang melakukan eksploitasi dan penanaman ketidakbenaran.

Visi dari gerakan ini adalah menciptakan tatanan masyarakat yang 'ideal' yakni seperti zaman Nabi. Upaya yang dilakukan untuk membangun tatanan ini adalah dengan menjebol tatanan yang telah ada sebelumnya. (Syam, 2010 : 7)(Adidhatama, 2009: 112).

Musuh besar kelompok radikal Islam adalah menolak modernisasi. Zaman yang dianggap baik adalah zaman para Nabi (sesuai pengetahuan yang hayatinya). Disisi lain masyarakat barat menilai modernisasi dan sekuler tidak dapat berjalan berdampingan dengan doktrin agama. Mereka menempatkan agama dalam posisi yang terpinggirkan. Agama dinilai sebagai keyakinan yang memuja sesuatu yang sakral dan tidak relevan dengan modernitas yang mengedepankan pedoman efektif dan efisien.

Dalam kasus pemberitaan CNN, seperti yang telah dibahas pada tahap analisa teks, produsen membangun pemahaman bahwa fenomena Dakheel adalah indikasi terwujudnya upaya kesetaraan gender. Pemahaman ini dilihat sebagai sebuah padangan mainstream. Media mengakomodir apa yang menjadi pandangan mainstream dimasyarakat. Ketika sudutpandang ini dipilih oleh media, tentu saja berarti bahwa pandangan ini adalah pandangan/ pemahaman yang mainstream tentang bagaimana hak-hak perempuan seharusnya diakui serta bagaimana negara memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, pandangan kontra datang dari para konsumen yang menganggap perempuan tidak dapat disamakan dengan laki-laki dinilai sebagai sebuah penolakan akan ide mainstream. Agama dan nilai keIslaman digunakan sebagai alat resistensi terhadap fenomena ini. Kestetaraan gender dianggap sebagai gerakan modernitas sekuler yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka yang berada pada posisi ini juga menilai pakaian yang dikenakan Dakheel telah dipengaruhi budaya barat.

Menurut Nur Syam (2010 : 7), Kelompok Islam radikal dinilai sangat responsif terhadap isu apapun yang datang dari barat. Ia juga mencatat Beberapa penyebab adanya/ munculnya kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia yang diidentifikasi melalui 3 hal. *Pertama* adalah adanya tekanan politik penguasa. Penyebab *kedua* adalah sejarah kegagalan rezim sekuler dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan negara yang diadopsi dari pengalaman negara barat. Pada saat tersebut terjadi korupsi besar-besaran yang memunculkan gerakan-gerakan masyarakat anti-korupsi. Gerakan ini menawarkan gagasan Islam sebagai gagasan alternatif. *Ketiga* adalah respon masyarakat terhadap isu-isu barat. Kelompok radikal selalu mengangkat isu-isu barat dan berada pada posisi mententang adanya pandangan barat.